

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.¹ Salah satu penyelenggara lembaga keuangan tersebut adalah bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdapat dua jenis bank di Indonesia, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, terdapat dua alternatif pelaksanaan yaitu secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah.

Di Indonesia usaha untuk mendirikan bank Islam dilakukan pada tahun 1990. Setelah melalui berbagai lokakarya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya membentuk suatu kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI. Tim ini bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Hasil tim kerja tersebut akhirnya melahirkan Bank Muamalat Indonesia. Akte pendirian bank itu ditandatangani pada 1 November 1991.

¹ Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet ke-1, hal.221.

² Pasal 1 angka(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Namun baru pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi dengan modal awal sekitar Rp 106 miliar.³

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia mulai terasa sejak tahun 1998. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dimana penggunaan prinsip syari'ah sudah diakomodir negara dalam kegiatan perbankan. Akibatnya mulai banyak berdiri bank-bank yang menggunakan prinsip syariah dalam kegiatannya baik bank baru maupun bank konvensional yang membuka unit syari'ah.

Salah satu bank konvensional yang membuka unit usaha syariah adalah Bank Tabungan Negara (BTN). Unit usaha syariah ini mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2004.⁴

Sebagai pelaku kegiatan perbankan, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah juga melakukan kegiatan menghimpun dana dan memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk yang diberikan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah kepada masyarakat adalah pembiayaan (*financing*). Salah satu produk

³ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet ke-3, hal. 294.

⁴ www.btn.co.id

pembiayaan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah adalah pembiayaan Multijasa BTN iB.

Bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah⁵. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁶ Adapun prinsip syariah yang dimaksud dalam hal ini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

Salah satu yang membedakan kegiatan perbankan konvensional dengan perbankan syariah terletak pada motif ekonominya. Pada ekonomi konvensional motifnya adalah Dalam ekonomi konvensional, motif aktivitas ekonomi mengarah kepada pemenuhan keinginan (*wants*) individu manusia yang tak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Sedangkan dalam motif ekonomi syari'ah (Islam) aktivitas ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (*needs*) yang tentu ada batasnya, meskipun bersifat dinamis sesuai tingkat ekonomi masyarakat pada saat itu.⁷ Selain itu semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan yang

⁵ Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008.

⁶ Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008.

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal. 4

menggunakan Prinsip Syariah haruslah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.⁸

Seluruh kegiatan bank syariah harus didasarkan pada akad yang gunanya untuk mengikat kedua belah pihak yang terkait (bank dan nasabah). Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*).⁹ Bentuk keuntungan yang diperoleh bank melalui imbalan atau dari bagi hasil sesuai akad, dan ketika bank tidak mengambil imbalan dalam transaksinya, maka hal tersebut adalah perwujudan dari kegiatan tolong menolong.

Salah satu bentuk kegiatan Bank Syariah adalah pembiayaan. Menurut pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang dimaksud dengan pembiayaan adalah sebagai berikut :

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan

⁸ Penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

⁹ Ascarya, *op.cit.*, h. 35.

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁰

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank dalam memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.¹¹ Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai penerima fasilitas dana. Sebagai pihak yang menerima dana, nasabah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada bank dengan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan (akad), sedangkan bank berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat juga mendapatkan imbalan berupa *ujrah*, atau bahkan tidak mendapatkan imbalan sama sekali atau mendapatkan bagi hasil dari dana yang telah disalurkaninya tersebut.

Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.¹² Dalam praktek bank syari'ah, *Ujr* atau *ujrah* banyak diaplikasikan pada bidang pembiayaan jasa. *Ujrah* tersebut merupakan keuntungan yang didapatkan bank atas jasa yang diberikan kepada nasabah.

¹⁰ Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet ke-1, hal. 160

¹² Ascarya, *op.cit.*, h. 111

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ حَجْمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّقُوا مِنْ خَرَجِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Abu Thoybah membekam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau membayar dia dengan satu sha' kurma dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya".¹³

Pembiayaan Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dewan Syari'ah Nasional telah menfatwakan hukum pembiayaan multijasa adalah boleh (jaiz) dengan syarat harus menggunakan akad ijarah atau kafalah. Lembaga Keuangan boleh memperoleh imbalan jasa (ujroh) atau fee dari jasa yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan besaran ujroh tersebut harus disepakati di awal akad dan harus dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.¹⁴

Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrag*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁵ Sedangkan akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung

¹³ Kitab Shahih Bukhari, Bab: Penjelasan tentang Tukang Bekam, Hadits .1960

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasioal Nomor 44/DSN/MUI/VII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pembiayaan Multi Jasa

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasioal Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Ijarah

(*makfuul 'anhu, ashil*).¹⁶ Dalam hal ini, pihak lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana (jasa) pada kedua akad tersebut berhak untuk menerima imbalan jasa (ujrah) atau fee atas jasa yang telah diberikannya.

Produk Pembiayaan Multijasa yang ditawarkan bank BTN iB berupa pembiayaan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pernikahan, biaya *travelling* (perjalanan wisata), dan biaya jasa- jasa lainnya. Dari beberapa macam pembiayaan dari Multijasa iB ini yang banyak diminati diantaranya adalah biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya *travelling* (perjalanan wisata).

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan Multijasa iB BTN Syariah menggunakan akad *kafalah* yang disertai dengan Ujrah (*Kafalah bil Ujrah*), dimana bank bertindak sebagai penjamin bagi pihak kedua (nasabah) dan pemberi dana bagi pihak ketiga (instansi yang bersangkutan). Maksimal pembiayaan yang diberikan berkisar dari 80% - 50% dari total pembiayaan yang diajukan nasabah dan dilihat juga dari anggunan yang nasabah miliki.

Pengembalian pinjaman pada pembiayaan Multijasa iB ini adalah minimum 6 bulan dan maksimum 5 tahun dari jangka waktu peminjaman. Dan dalam masa akad nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya asuransi jiwa dan juga biaya fee atau ujrah. Ujrah pada pembiayaan Mutijasa iB ini telah ditetapkan oleh BTN Syariah dalam bentuk nominal sesuai dengan besarnya pembiayaan yang diberikan dan jangka waktunya.

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasioal Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Kafalah

Pada ujah yang ditetapkan oleh BTN syariah tidak ada perbedaan atau sama untuk semua jenis pembiayaan yang ada dalam produk pembiayaan Multijasa iB. Apabila kita lihat dari semua jenis pembiayaan Multijasa iB ini fungsi, manfaat serta kegunaan dari setiap jenis pembiayaan berbeda. Maka seharusnya pun jumlah ujah untuk masing-masing dari jenis pembiayaan ini pun berbeda-beda.

Dan dalam pelaksanaan prosedur dan mekanisme pada produk pembiayaan Multijasa iB BTN syariah ini diantaranya pada saat pencairan dana yang sebelumnya telah dikenakan biaya administrasi dan biaya materai, dimana dari salah satu jenis pembiayaan Multijasa iB yakni biaya *travelling* (perjalanan wisata), dana langsung diberikan kepada nasabah (pihak kedua) bukan kepada pihak ketiga (instansi).¹⁷

Sehingga tugas bank sebagai penjamin dan pemberi dana pada pihak ketiga tidak ada (hilang), maka rukun dan syarat yang ada pada akad *kafalah* tidak terpenuhi dan ujah yang diterima pun tidak jelas perolehannya darimana.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengetahui apa saja dasar yang dipakai oleh perbankan syariah khususnya BTN Syariah pada produk pembiayaan Multijasa BTN iB dalam penetapan serta penerapan ujah dan penerapan pelaksanaan prosedur dan mekanisme pembiayaan Multijasa BTN iB ini, sehingga penulis pun tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Penetapan Ujah pada Produk**

¹⁷ Tofan, Marketing BTN Syariah Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Juli 2013

Pembiayaan Multijasa BTN iB dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada BTN Syariah Cabang Pekanbaru).”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan mengingat luasnya pembahasan tentang permasalahan ini, dan keterbatasan waktu dan biaya, maka penulis akan membatasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni Implementasi Penetapan Ujrah pada Produk Pembiayaan Multijasa BTN iB dalam Perspektif Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Adapun masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep ujrah yang diterapkan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah?
2. Bagaimana implementasi ujrah pada produk pembiayaan Multijasa BTN iB?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi penerapan ujrah pada produk pembiayaan Multijasa BTN iB?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menjelaskan bagaimana konsep ujroh menurut Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah.
- 2) Untuk menjelaskan bagaimana Implementasi penerapan ujroh pada produk Pembiayaan Multijasa BTN iB dalam perspektif ekonomi Islam.
- 3) Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap Implementasi penerapan ujroh pada produk Pembiayaan Multijasa BTN iB dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada perbankan dan nasabah dalam upaya perkembangan perbankan syariah.
- 2) Bagi pihak-pihak lain, dapat bermanfaat sebagai bahan petunjuk atau bahan untuk penelitian lebih lanjut.
- 3) Menambah pengetahuan bagi penulis sendiri dalam mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan di Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metodologi Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di salah satu cabang perbankan syariah yang ada di Pekanbaru

yakni BTN ib Syariah yang berada di jalan Tuanku Tambusai, adapun yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini dikarenakan BTN Syariah ini merupakan salah satu bank yang mempunyai produk Multijasa yang berdasarkan akad Kafalah.

2) Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek atau pelaku yang akan diteliti adalah pimpinan dan karyawan yang ada di BTN Syariah, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah implementasi penetapan ujah pada produk Multijasa BTN iB menurut perspektif ekonomi Islam.

3) Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah karyawan dari BTN Syariah yaitu sebanyak 22 orang. Dalam menetapkan sampel, penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* pengambilan sampel dilakukan secara langsung terhadap populasi yang dijumpai tanpa memandang strata maupun perwakilan unitnya. Dari seluruh populasi yang ada maka diambil sebanyak 8 orang sampel yang terdiri dari pimpinan, sekretaris dan 6 orang bagian dari pembiayaan.¹⁸

4) Sumber Data

¹⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 152. Lihat juga Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), Ed 1, h. 186

1. Data Primer.

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber aslinya yakni data tersebut diperoleh dari Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Tuanku Tambusai.¹⁹

2. Data Sekunder

Data Sekunder yakni data nasabah yang dimiliki bank dan data yang diperoleh dari referensi buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur atau data-data yang berhubungan dengan penulisan. Dilanjutkan dengan mengklasifikasi bahan yang dimaksud, membaca dan menganalisis bahan-bahan yang telah diperoleh tersebut.²⁰

5) Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi dalam 3 (tiga) metode , yaitu:

- a. Dokumentasi, salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek.²¹

¹⁹ Dr. Muhammad, M. Ag, *Metode Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), Ed 1, Cer 1, h. 103

²⁰ Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), Ed 1, h. 190

²¹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.165

- b. Wawancara, yaitu percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu.²² Wawancara ini dilakukan dengan sampel yang telah dipilih.
- c. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitanya dengan persoalan yang diteliti.²³

6) Analisa Data

Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka selanjutnya penulis melakukan analisis data dengan menggunakan beberapa metode:

- a. Deskriptif analitik, yaitu dengan menggambarkan data yang telah ada kemudian diambil kesimpulan.
- b. Komparatif analitik, yaitu dengan membandingkan antara data lapangan yang merupakan gejala-gejala konkrit dengan teori-teori yang berkenaan dengan masalah kemudian diambil kesimpulan.

F. Sistematika Penelitian

Secara garis besar Sistematika Penulisan Laporan Penelitian akan ditulis dalam 5 (lima) Bab, dengan uraian sebagai berikut:

²²*Ibid*, h. 172

²³ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Ed 1 Cet 1. H. 14

- BAB I : PENDAHULUAN yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian dan metodologi penelitian.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN yang meliputi sejarah berdirinya Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, visi, misi dan tujuan pendiriannya, struktur organisasi, produk Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, semboyan dan pedoman budaya kerja BTN Syariah.
- BAB III : KERANGKA TEORITIS yang meliputi ujarah, jualah, akad kafalah, pembiayaan multijasa.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN yang meliputi hasil dari penelitian pada Konsep ujarah yang diterapkan BTN Syariah, Implementasi penerapan ujarah pada produk pembiayaan multijasa BTN iB dan Tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi penerapan ujarah pada produk pembiayaan multijasa BTN iB.
- BAB V : PENUTUP yaitu meliputi Kesimpulan dan Saran

